

Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Inklusif di Jawa Tengah Indonesia

Hakiman, Siti Choiriyah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

hakiman.iman@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penyelenggaraan madrasah inklusif di Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara kepada pemangku kebijakan madrasah, kepala sekolah, wakil kepala bidang kurikulum, bidang kesiswaaan, guru kelas, guru pendamping khusus dan tim inklusif, observasi partisipan, studi dokumentasi dan forum grup diskusi. Adapun objek penelitian ini adalah di empat madrasah inkluisf yaitu: Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kartasuro Sukoharjo, Madrasah Ibtidaiyah Keji Kabuptaen Semarang, Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Sidomulyo dan Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Kebumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah mengacu pada tiga pilar yaitu budaya, kebijakan dan praktik. Budaya inklusif diimplementasikan dalam pemberian layanan pendidikan inklusif, dan kebijakan inklusif di madrasah diwujudkan dalam visi, misi dan program unggulan dan didukung dengan peningkatan kapasitas penanganan anak berkebutuhan khusus. Praktik penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah nampak dari adanya identifikasi dan asesmen pada anak berkebutuhan khusus, kurikulum yang adaptif dan akomodatif. Proses pembelajaran dilengkapi dengan rancangan program pembelajaran individual dan pembelajaran dilakukan dengan kolaborasi serta modifikasi metode, media dan evaluasi.

Key word: Madrasah Inklusif, Penyelenggaraan pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus

1. Pendahuluan

Madrasah ibtidaiyah adalah sekolah setingkat sekolah dasar yang berada di bawah naungan direktorat pendidikan agama Islam kementerian agama Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusif. Madrasah inklusif merupakan sekolah yang menerima berbagai latar belakang kebutuhan khusus untuk dikembangkan berbagai bakat dan potensinya. Sejak tahun 2008 pendidikan inklusif di Madrasah sudah berlangsung tetapi kebijakan pengelolaan pendidikan inklusif di Madrasah dimulai sejak 2013. Dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam no 3211 tahun 2016 tentang penetapan madrasah inklusif, yaitu ada 22 madrasah inklusif di Indonesia yang terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah yaitu setingkat dengan sekolah dasar dan Madrasah Tsanawiyah setingkat dengan sekolah menengah pertama.

Penyelenggaraan madrasah inklusif berdasarkan pada keluasaan akses masyarakat dalam mengikuti pendidikan khusus di bawah naungan pendidikan yang berada di bawah kementerian

agama. Adapun landasan pendidikan inklusif di Madrasah sebagaimana terdapat dalam buku panduan pendidikan inklusif di madrasah menjelaskan secara normatif didasarkan pada Quran Surah Al-‘Alaq ayat 1-5, Quran Surah ‘Abasa ayat 1-16¹. Madrasah inklusif dapat memfasilitasi sebagian dari banyaknya anak berkebutuhan khusus di Indonesia, karena dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus ada 70% yang belum mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Indonesia sejak tahun 2016 memiliki 29.317 sekolah penyelenggara inklusif dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK, sehingga baru 11% dari jumlah total sekolah di Indonesia yang sudah berstatus sekolah inklusif². Adapun madrasah inklusif yang berada di bawah kementerian agama berjumlah 160 madrasah, tetapi menurut hasil penelitian Sumarni³ dan Ramadanti dan Wicaksono⁴ dalam penyelenggaraannya madrasah inklusif belum sepenuhnya menerapkan konsep sekolah inklusif karena masih kurangnya dukungan tenaga ahli, guru pendamping khusus, sarana pembelajaran, kurikulum, dukungan orangtua dan belum adanya pengawasan dari kementerian agama.

Penelitian Hanum mengungkapkan bahwa minimnya referensi buku Pendidikan Agama Islam bagi siswa berkebutuhan khusus menjadi kendala yang dihadapi oleh guru⁵. Diperlukan kurikulum Pendidikan Agama bagi anak berkebutuhan khusus⁶, sehingga perlu ada dukungan pemerintah dalam memberikan dukungan pada penyelenggaraan sekolah inklusif⁷ salah satunya dalam memberikan buku pegangan atau modul pendidikan khusus. Dukungan pelatihan dan pengembangan guru secara internal dalam menangani siswa yang mengalami hambatan belajar dapat menjadi bagian dari penerapan kebijakan⁸. Madrasah inklusif perlu menyiapkan berbagai sarana pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif secara komprehensif, sehingga penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat secara maksimal dilaksanakan.

¹ Lailil Qomariyah et al., *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Madrasah* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017), 3.

² Wahyudi Wahyudi and Ratna Kristiawati, “Gambaran Sekolah Inklusif Di Indonesia: Tinjauan Sekolah Menengah Pertama,” *Gambaran Sekolah Inklusif Di Indonesia* (2016): xi–95, http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_14D0F106-F4EE-486B-A74F-84A191B4AD25_.pdf.

³ Sumarni, “Pengelolaan Pendidikan Inklusif Di Madrasah,” *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 17, no. 2 (2019): 148–161, <https://jurnaledukasikemenag.org/index.php/edukasi>.

⁴ Fahriza Ragil Ramadanti and Harto Wicaksono, “Model Pendidikan Inklusi Dan Respon Orang Tua Dalam Implementasi Sekolah Inklusif Di MI Keji Ungaran Barat, Semarang Fahriza Ragil Ramadanti, Harto Wicaksono” 10, no. 1 (2021): 23–37, <https://journal.unnes.ac.id/>.

⁵ Lathifah Hanum, “Pembelajaran Pai Bagi Anak Berkebutuhan Khusus,” *Pendidikan Agama Islam* 11, no. 1 (2012): 81–89.

⁶ Dinda Zulaikhah, Akhmad Sirojuddin, and Andika Aprilianto, “Analisis Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kurikulum K13 Bagi Anak Berkebutuhan,” *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 1, no. 1 (2020): 54–71.

⁷ Janu Arlinwibowo et al., “Inclusion Schools in the Daerah Istimewa Yogyakarta Province, Indonesia: Regulations, Facilities and Aspirations of Teachers,” *International Journal of Early Childhood Special Education* 13, no. 1 (2020): 09–19.

⁸ Mantheme Florina Matolo and Awelani M. Rambuda, “Factors Impacting the Application of an Inclusive Education Policy on Screening, Identification, Assessment, and Support of the Learners at Schools in South Africa,” *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research* 20, no. 9 (2021): 207–221.

Hasil penelitian Rahmi dan Muqowim menunjukkan bahwa madrasah inklusif di wilayah Sumatera Barat belum maksimal dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif karena berjalan apa adanya⁹. Madrasah inklusif pada implementasinya belum didukung oleh dukungan kebijakan dan dukungan sumberdaya manusia yang memadai seperti guru. Hasil penelitian penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dikemukakan Rasmitadila, menunjukkan bahwa kesiapan penyelenggaraan pendidikan inklusif masih terkendala dengan beberapa hal seperti: belum tersedianya fasilitas pendukung yang dapat diakses oleh semua siswa, khususnya ABK, keterediaan guru pendamping khusus, sekolah tidak mendapatkan informasi/pelatihan/sosialisasi yang cukup tentang penyelenggaraan sekolah inklusif, kurangnya keterampilan dan pemahaman guru tentang sekolah inklusif, pola pikir orangtua dan masyarakat tentang sekolah inklusif, masih terbatasnya dana penyelenggaraan sekolah inklusif dan masih kurangnya keterlibatan pemerintah untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif¹⁰.

Melihat berbagai fenomena penyelenggaraan madrasah inklusif baik madrasah inklusif di Indonesia yang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif. Maka perlu kami melakukan eksplorasi terkini terkait dengan penyelenggaraan madrasah Ibtidaiyah inklusif di Jawa tengah Indonesia. Hasil dari eksplorasi pengalaman penyelenggaraan madrasah inklusif di empat madrasah ibtidaiyah inklusif di provinsi Jawa Tengah Indonesia yang menjadi madrasah yang ditunjuk oleh kementerian agama Indonesia dapat menjadi rujukan bagi madrasah-madrasah rintisan yang ada di Indonesia. Lebih luas lagi tulisan ini menjadi referensi bagi negara-negara yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Asia seperti Indonesia, Singapura, Filipina dan China yang masih terjebak pada problem yang dihadapi seperti kesiapan tenaga pengajar, pembelajaran yang profesional dan kebijakan dari kepala sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif¹¹. Makalah ini mengeksplorasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Madrasah Ibtidaiyah dilihat dari budaya, kebijakan dan praktik. Hal ini merujuk pada Booth & Ainscow bahwa yang menjadi pilar pendidikan inklusif meliputi budaya, kebijakan dan praktik pendidikan inklusif¹².

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara kepada para pemangku kebijakan madrasah Ibtidaiyah, pengurus yayasan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, guru kelas, guru

⁹ Aulia Rahmi and Muqowim, "Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Madrasah Di Sumatera Barat," *Ranah Research Journal of Multidisciplinary Research and Development* 4, no. 2 (2019): 15–25.

¹⁰ Rasmitadila, *Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*, ed. Nur Indah Sari Yanita (Depok: Rajawali Pers, 2020), 2.

¹¹ Rhonda Faragher et al., "Inclusive Education in Asia: Insights From Some Country Case Studies," *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities* 18, no. 1 (2021): 23–35.

¹² Tony Booth and Mel Ainscow, *Index for Inclusion Developing Learning and Participation in School* (United Kingdom: Centre for Studies on Inclusive Education, 2002), 8. [https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index English.pdf](https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20English.pdf).

pendamping khusus, orangtua wali siswa dan ahli yang yang menjadi partner madrasah. Pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi partisipatif dan dokumentasi di empat madrasah inklusif yang menjadi objek penelitian. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi metode, sumber dan teori. Adapun untuk teknik analisis data peneliti menggunakan analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles Huberman yaitu dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data pengambilan kesimpulan¹³.

3. Hasil Penelitian

Dari berbagai temuan lapangan yaitu di empat Madrasah inklusif yaitu Madrasah Ibtidaiyah Keji Ungaran Semarang, Madrasah Ibtidaiyah Maarif Sidomulyo Kebumen, Madrasah Salafiyah Banyumas dan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kartasuro Sukoharjo, maka model penyelenggaraan madrasah inklusif di Jawa Tengah dapat dideskripsikan sebagai berikut:

3.1. Kebijakan

Hadirnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia no 90 Tahun 2013, bahwa Madrasah wajib menyelenggarakan pendidikan inklusif. Hal tersebut menunjukkan komitmen kementerian agama republik Indonesia untuk mewujudkan *education for all*. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi program jangka menengah dari kementerian agama republik Indonesia dalam rangka memberikan pemerataan pendidikan Islam bagi semua warga negara. Madrasah inklusif hadir dalam rangka memberikan layanan pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan tanpa memisahkan mereka dalam proses pendidikannya. Anak berkebutuhan khusus bersama-sama dengan siswa lainnya berada dalam lingkungan yang dalam sama yaitu lingkungan sekolah tanpa adanya diskriminasi tetapi diperlakukan secara khusus.

Kebijakan penyelenggaraan inklusif didasarkan pada kebijakan secara nasional kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam no 3211 tahun 2016 tentang penetapan madrasah inklusif diantaranya yaitu empat madrasah ibtidaiyah inklusif diantaranya Madrasah Ibtidaiyah Keji Ungaran Semarang, Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Sidomulyo Kebumen, Madrasah Salafiyah Banyumas dan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kartasuro Sukoharjo yang ditunjuk oleh kementerian untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Hal tersebut menjadi penguat atas terselenggaranya pendidikan inklusif, pendidikan inklusif hanya bisa dicapai jika kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung siswa yang telah dikembangkan dan ditinjau berdasarkan standar kebijakan dan nasional dan internasional untuk menyediakan pendidikan berkualitas¹⁴.

¹³ Matthew B Miles, Micheal Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 3rd ed. (California: SAGE Publication, Inc, 2014), 33. <https://www.amazon.com/Qualitative-Data-Analysis-Methods-Sourcebook/dp/1452257876>.

¹⁴ Paseka Andrew Mosia, "Threats to Inclusive Education in Lesotho: An Overview of Policy and Implementation Challenges," *Africa Education Review* 11, no. 3 (2014): 292–310.

Kebijakan pemerintah dalam pendidikan inklusif di madrasah menjadi dasar civitas madrasah dalam melakukan berbagai perubahan kebijakan di madrasah. Adanya kebijakan madrasah inklusif disambut dengan respon yang positif dengan diikuti berbagai perubahan di Madrasah¹⁵. Kebijakan pemerintah kemudian diadaptasi oleh madrasah penyelenggara pendidikan inklusif, karena kebijakan pendidikan inklusif bukan dari usulan madrasah sehingga sistem kebijakn bersifat top down, sehingga kebijakan pendidikan inklusif bukan berasal dari usulan sekolah tetapi keluar dari kebijakan pemerintah¹⁶.

Pada tahap implementasinya kebijakan pendidikan inklusif di madrasah dtuangkan dalam kebijakan inklusif dituangkan dalam visi misi madrasah dalam penyelenggaraan sekolah, dari visi misi inilah kita akan melihat madrasah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif. Tabel 1 berikut menggambarkan visi misi madrasah inklusif.

Tabel 1: Visi Misi Madrasah Inklusif

Nama Madrasah	Visi	Misi
Madrasah Ibtidaiyah Keji Ungaran Kabupaten Semarang	Terwujudnya Generasi Muslim Yang Qur'ani, Berprestasi, Dan Peduli	Melaksanakan pembelajaran yang ramah anak dengan menyelenggarakan pendidikan inklusif.
MI Salafiyah Kebarongan	Tangguh, Unggul dan Berakhlakul Karimah	-
MI Ma'arif Sidomulyo	Terbentuknya manusia yang religious, Berprestasi dan Inklusif	Melaksanakan pembelajaran yang professional yang terintegrasi dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama`ah serta dengan menyelenggarakan pendidikan inklusif.

¹⁵ Zumrotul Mukaffa, "Pngembangan Model Madrasah Inklusif (Studi Atas Kesiapan Dan Model Pengembangan Kurikulum Madrasah Inklusif Madrasah Ibtidaiyah AL-Hidayah Margorejo Surabaya)," *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2017): 1.

¹⁶ Reno Fernandes, "Adaptasi Terhadap Kebijakan Pendidikan Inlusif," *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 4, no. 2 (2017): 119–125, <http://socius.ppj.unp.ac.id/index.php/socius/article/view/16/10>.

MI Muhammadiyah Kartasuro	Memupuk benih kesalehan - serta unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan taqwa.
------------------------------	---

Dari tabel 1 di atas nampak bahwa ada dua madrasah yang mencamtumkan inklusif dalam misi madrasah yaitu Madrasah Ibtidaiyah Keji Ungaran Kabupaten Semarang dan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Sidomulyo. Adapun tujuan dan program dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2: Tujuan dan Program di Madrasah Inklusif

Nama Madrasah	Tujuan	Program
Madrasah Ibtidaiyah Keji Ungaran Kabupaten Semarang	<ul style="list-style-type: none"> - Terlayannya peserta didik berkebutuhan khusus dalam program inklusi. - Terwujudnya sikap dan perilaku yang inklusif di lingkungan madrasah. 	Program Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus
MI Salafiyah Kebarongan		Program Unggulan Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Kebarongan adalah hafal juz 30 dan pendidikan Inklusif
MI Ma'arif Sidomulyo		Program Insklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (SK Dirjen Pendis nomor 3211 tentang penetapan 22 madrasah inklusif)
MI Muhammadiyah Kartasuro		-

Dari tabel 2 di atas menunjukkan bahwa pendidikan inklusif menjadi bagian dari program madrasah, bahkan menjadi program unggulan madrasah. Terlihat secara tertulis pendidikan inklusif menjadi program di tiga madrasah yaitu: Madrasah Ibtidaiyah Keji Ungaran Kabupaten Semarang, Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Kebarongan dan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Sidomulyo, tabel 2 tersebut terlihat juga bahwa Madrasah Ibtidaiyah Keji Ungaran Kabupaten Semarang yang mencamtumkan inklusif dalam tujuan madrasah dan program unggulan.

Kebijakan madrasah inklusif dituangkan dalam visi, misi dan tujuan dan program unggulan madrasah. visi dan misi madrasah menjadi penting karena dari visi misi menjadi ladsan yang hendak dicapai dalam pendidikan inklusif. Visi, misi, tujuan sekolah serta program sekolah hadir dalam mewujudkan budaya inklusif di madrasah, walaupun sebagian dari madrasah tidak mencamtumkan dalam visi dan misi madrasah tetapi madrasah mencamtumkannya dalam tujuan

dan program madrasah. Merujuk pada Kottern yang dikembangkan oleh Zamroni bahwa budaya sekolah harus didukung dengan kehadiran visi baru dan mensosialisasikan visi tersebut kepada masyarakat serta memberikan workshop dan pelatihan untuk mendukung budaya tersebut¹⁷. Visi misi menjadi bagian integral kebijakan madrasah dalam mewujudkan madrasah inklusif. Inklusifitas di Madrasah ini didukung oleh kebijakan baik secara nasional maupun secara institusional di mana madrasah menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kepala sekolah menjadi tumpuan dalam membuat kebijakan inklusif di madrasah.

Madrasah inklusif melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif dan memberikan peningkatan mutu guru dengan program pelatihan hal ini memperkuat hasil penelitian Mukhlis yang menunjukkan bahwa kebijakan inklusif salahsatunya dapat dilihat dari kebebasan interaksi, kesamaan kelas dan lingkungan inklusif¹⁸. Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif madrasah menyediakan profesional pendukung layanan inklusif, madrasah menyediakan dokter, madrasah menyediakan konselor, madrasah menyediakan okupasi, madrasah menyediakan pisioterapi, madrasah menyediakan psikolog dan madrasah menyediakan guru khusus lulusan dari guru. Kebijakan pendidikan inklusif di madrasah masih belum ideal karena ketersediaan profesional di madrasah masih sangat terbatas hal ini karena kurangnya ketersediaan dana. Pendidikan inklusif akan berhasil apabila dilakukan melalui kolaborasi dan didukung oleh psikolog, konselor, terapis, pedagog dan kebijakan sekolah¹⁹.

Pelibatan profesional yang dilakukan oleh madrasah inklusif melalui kerjasama eksternal dengan lembaga atau pusat layanan disabilitas yang ada di kota atau kabupaten dimana madrasah itu berada. Pihak sekolah membuat nota kesepakatan dengan lembaga profesional baik itu yayasan profesional yang menangani disabilitas maupun lembaga profesional seperti puskesmas dan rumah sakit atau tempat rehabilitasi. Kepala sekolah dapat menciptakan dan mendukung sekolah inklusif dengan mendirikan dan menyampaikan visi, memfasilitasi pengalaman belajar berkualitas tinggi bagi siswa, membangun kapasitas profesional, menciptakan organisasi yang mendukung untuk belajar dan bekerjasama dengan mitra eksternal²⁰.

Kebijakan strategis penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yaitu dengan menyediakan guru lulusan sekolah luar biasa yang didukung dengan kebijakan program individual bagi anak berkebutuhan

¹⁷ Zamroni, *Kultur Sekolah* (Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2016), 151.

¹⁸ Mukhlis, "Kebijakan Pendidikan Inklusif: Implementasinya Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia," *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 1 (2011).

¹⁹ Hakiman, Bambang Sumardjoko, and Waston, "Religious Instruction for Students with Autism in an Inclusive Primary School," *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research* 20, no. 12 (2021): 139–158.

²⁰ David DeMatthews et al., "Principal Leadership for Students with Disabilities in Effective Inclusive Schools," *Journal of Educational Administration* 58, no. 5 (2020): 539–554.

khusus. Ada 3 langkah dalam mengelola madrasah inklusif yaitu melakukan perencanaan SDM inklusif, inventori SDM dan melakukan strategi pembelajaran inklusif. Secara tertulis madrasah juga membuat surat keputusan untuk tim inklusif, tim asesmen, tim kolaborasi kurikulum dan tim kolaborasi pembelajaran²¹. Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, penyelenggaraan di madrasah dapat berjalan dengan baik walaupun masih ada kekurangan. Madrasah perlu untuk membuat inovatif kebijakan sehingga tidak ada ketergantungan pada otoritas kebijakan pemerintah²².

3.2. Budaya Inklusif

Budaya inklusif di madrasah secara umum dalam hasil wawancara dan observasi menunjukkan nilai-nilai inklusivitas. Adapun untuk budaya inklusif dapat dilihat dari bagaimana warga madrasah dapat menerima kehadiran anak berkebutuhan khusus, semua anak-anak dapat menerima kehadiran anak berkebutuhan khusus di dalam kelas sehingga tidak ada penyebutan anak cacat pada anak berkebutuhan khusus. Madrasahpun menyediakan sarana pendukung penyelenggaraan inklusif yaitu dengan menyediakan alat-alat untuk membantu dalam terapi kognitif dan motorik. Semua civitas akademik madrasah juga dilibatkan dalam penanganan anak berkebutuhan khusus dengan membantu setiap kesulitan yang dihadapi anak berkebutuhan khusus, seperti staf akademik membantu siswa dalam memberikan layanan administrasi, tukang kebun membantu siswa mengarahkan ke dalam kelas, penjaga kantin membantu memilihkan makanan yang aman buat anak berkebutuhan khusus dan lain-lain. Ada perubahan paradigma pendidikan inklusif yang lebih menekankan pada keadilan sosial dan hak asasi manusia. Hal ini sependapat dengan yang disampaikan Köpfer & Óskarsdóttir bahwa pemahaman inklusif berbasis hak asasi manusia yang ditransformasikan pada budaya sekolah untuk mendukung semua murid²³.

Membentuk budaya inklusif di madrasah merupakan awal terselenggaranya madrasah inklusif, semua civitas akademik di madrasah memahami tentang pentingnya inklusifitas dan ikut mendukung dalam memberi layanan bagi anak berkebutuhan khusus. Budaya inklusif di madrasah diwujudkan dengan adanya rasa hormat anak berkebutuhan khusus, tidak ada penyebutan anak cacat pada anak berkebutuhan khusus, warga sekolah kepada setiap anak berkebutuhan khusus, memberikan fasilitas untuk mendukung anak berkebutuhan khusus, memberikan pelatihan atau workshop kepada guru secara berkala untuk mengenal dan menangani anak berkebutuhan khusus, menjadikan orangtua sebagai partner dan observer dalam pembuatan program pembelajaran anak

²¹ Wibowo et al., "Model Peningkatan Sumber Daya Pendidik Pada Madrasah Ibtidaiyah Inklusi Menghadapi Era Society 5.0 Dan Revolusi Industri 4.0," *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES* (2019): 910–916.

²² Dzunuwanus Ghulam Manar, "Pembelajaran Inovasi Kebijakan Inklusif," *Jurnal Studi Pemuda* 7, no. 1 (2019): 14.

²³ Andreas Köpfer and Edda Óskarsdóttir, "Analysing Support in Inclusive Education Systems—a Comparison of Inclusive School Development in Iceland and Canada since the 1980s Focusing on Policy and in-School Support," *International Journal of Inclusive Education* 23, no. 7–8 (2019): 876–890.

berkebutuhan. Budaya inklusif berawal dari kesadaran madrasah yang menjadi faktor internal utama dalam mewujudkan budaya inklusif di sekolah, faktor internal sekolah menjadi faktor penting terwujudnya budaya inklusif²⁴.

Untuk mendukung budaya inklusif dan mendukung wawasan inklusif serta profesional guru di madrasah, para guru mengikuti pelatihan dan workshop tentang penanganan siswa berkebutuhan khusus baik secara online maupun secara offline, tetapi pelatihan dan workshop yang diikuti oleh guru hanya sebatas kesadaran sendiri para guru. Penyelenggaraan workshop dan pelatihan belum dilakukan oleh madrasah secara mandiri seperti mengundang ahli untuk memberikan pelatihan maupun workshop. Sehingga dari 4 madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif belum ada pelatihan atau workshop yang secara periodik dilakukan oleh madrasah yang menjadi alasan utama adalah berkaitan dengan anggaran. Strategi dalam pendidikan inklusif dibangun dengan budaya sekolah, harapan yang tinggi dari berbagai civitas sekolah, dukungan administratif, pengembangan profesional, kolaborasi, evaluasi siswa, akomodasi dan modifikasi, dukungan paraprofesional, dan keterlibatan orang tua²⁵.

3.3. Praktik Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Madrasah

Pada tahap penyelenggaraan pendidikan inklusif di Madrasah mereka berkerjasama dengan stakeholder dalam meningkatkan layanan pendidikan inklusif. Kerjasama dilakukan dalam rangka penanganan anak berkebutuhan khusus, seperti yang dilakukan oleh Madrasah Keji Ungaran kabupaten Semarang yang melakukan kerjasama dengan Yayasan Autisma Yogasmaras Semarang Tahun 2012 –sekarang, N-Ergy Psychology Center Tahun 2014 – sekarang, LP Ma'arif NU Prov Jawa Tengah Tahun 2015 –Sekarang dan Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia (AUSAID) tahun 2016 serta Unicef tahun 2017.

Adapun untuk Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Kebarongan dan Madrasah Ibtidaiyah Sidomulyo Kebumen mereka bekerjasama dengan puskesmas dan rumah sakit terdekat selain mereka sebelumnya bekerjasama dengan AUSAID dan UNICEF. Kerjasama dilaksanakan dalam rangka memberikan layanan pendidikan inklusif pada anak kebutuhan khusus. Adapun kerjasama yang dilakukan oleh madrasah dengan puskesmas dilakukan dalam rangka memberikan penanganan medis pada anak berkebutuhan khusus.

Kehadiran AUSAID dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif memberikan dampak positif kepada madrasah, madrasah didampingi dalam hal pengetahuan, wawasan, pengelolaan dan pembiayaan. Madrasah inklusif yang bekerjasama dengan AUSAID khususnya empat madrasah yang menjalan kemitraan diberi dana oleh AUSAID hampir 115.000.000 untuk kebutuhan alat

²⁴ George A Marcoulides, Ronald H. Heck, and Constantinos Papanastasiou, "Student Perceptions of School Culture and Achievement: Testing the Invariance of a Model," *International Journal of Educational Management* 19, no. 2 (2005): 141–153.

²⁵ Grace Lavín Francis et al., "Inclusive Education De Fi Nitions and Practices : Exploring Perspectives of Education Professionals in Mexico City" (2020),10.

layanana anak berkebutuhan khusus seperti alat bantu motorik dan terapis. Kemitraan dengan UNICEF juga memberi dampak positif pada wawasan dan kualitas layanan madrasah dalam memberikan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Bantuan yang diberikan oleh UNICEF berbeda dengan AUSAID, UNICEF lebih memberikan dalam layanan peningkatana sumber daya manusia (SDM). Bantuan UNICEF lebih mengarah pada pendampingan penyelenggaraan madrasah inklusif seperti bagaimana cara memberikan pembelajaran siswa ABK, bagaimana cara melakukan asesmen, bagaimana cara melakukan terapi motorik, bagaimana cara melakukan adaptasi kurikulum, baimana cara melakukan pendampingan ABK dan bagaimana cara membuat media pembelajaran bagi siswa ABK.

UNICEF memberikan pendampingan kepada madrasah penyelenggara inklusif kurang lebih 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun para guru di trening dan didampingi langsung oleh tim dari UNICEF. Setelah diberikan pendampingan selama dua tahun kemudian guru dan pengelola madrasah melanjutkan secara mandiri untuk pelaksanaan pendidikan inklusifnya. Dukungan yang diberikan kepada mdrasah dari UNICEF memberikan perkembangan pendidikan inklusif di madrasah dari mulai perubahan budaya inklusif, kebijakan maupun praktik. Madrasah inklusif melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif dan memberikan peningkatan mutu guru dengan program pelatihan hal ini memperkuat hasil penelitian Mukhlis yang menunjukkan bahwa kebijakan inklusif salahsatunya dapat dilihat dari kebebasan interaksi, kesamaan kelas dan lingkungan inklusif²⁶.

Adapaun kendala yang dihadapi madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah berkaitan dengan anggaran. Karena anggaran menjadi faktor utama dalam memberikan layanan bagi anak berkebutuhan khusus, seperti ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan guru pendamping khusus dan ketersediaan tim asesmen atau tim inklusif. Berikut ketersediaan guru pendamping khusus pada madrasah inklusif di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3: Jumlah siswa ABK dan Jumlah GPK

Nama Madrasah	Jumlah Siswa Anak berkebutuhan Khusus	Jumlah Guru Pendamping
Madrasah Ibtidaiyah Keji Ungaran Kabupaten Semarang	28	4
MI Salafiyah Kebarongan	12	4
MI Ma'arif Sidomulyo	17	5

²⁶ Mukhlis, "Kebijakan Pendidikan Inklusif: Implementasinya Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia." *Administrasi Pendidikan*, 2, no. 1 (2011): 1-9.

Dari tabel 3 di atas terlihat ketersediaan guru pendamping khusus sangat di Madrasah Ibtidaiyah Keji Ungaran, Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Kebarongan dan Madrasah Ibtidaiyah Sidomulyo masih terbatas dalam ketersediaan guru pendamping khusus. Sebaliknya di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kartasuro ketersediaan guru pendamping khusus sangat memadai, karena satu anak berkebutuhan khusus didampingi oleh satu guru pendamping khusus.

Keterbatasan penyediaan guru pendamping khusus faktor utamanya adalah madrasah tidak mempunyai biaya untuk menggaji guru pendamping khusus, sehingga dalam proses pendampingan dimaksimalkan guru pendamping khusus yang ada di sekolah. Kelemahan ekonomi orangtua menjadi faktor utama, sehingga dia tidak bisa mampu membayar gaji guru pendamping khusus. Keterbatasan guru pendamping khusus juga disebabkan karena belum adanya jurusan atau prodi pendidikan khusus di Perguruan Tinggi Islam seperti Institut agama Islam negeri atau universitas Islam negeri. Guru pendamping khusus sebagian besar berasal dari lulusan jurusan pendidikan sekolah luar biasa (SLB).

Pada tataran praktik madrasah idealnya menyediakan profesional pendukung layanan inklusif, madrasah menyediakan dokter, madrasah menyediakan konselor, madrasah menyediakan okupasi, madrasah menyediakan pisioterapi, madrasah menyediakan psikolog dan madrasah menyediakan guru khusus lulusan dari guru SLB. Idealitas pendidikan inklusif dilihat dari realitas lapangan di madrasah inklusif di Jawa Tengah masih belum ideal karena ketersediaan profesional di madrasah masih sangat terbatas, untuk mendukung praktik penyelenggaraan pendidikan inklusif. Madrasah hanya didukung oleh guru lulusan sekolah luar biasa dan psikolog yang masih sangat terbatas. Pelibatan profesional yang dilakukan oleh madrasah inklusif melalui kerjasama dengan lembaga atau pusat layanan disabilitas yang ada di kota atau kabupaten dimana madrasah itu berada.

Untuk memberikan layanan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus, madrasah melakukan identifikasi pada anak berkebutuhan khusus dengan membuat tim asesment yang didukung oleh tenaga profesional seperti dokter, psikiater, psikolog dan terapis. Kehadiran profesional di madrasah inklusif sangat diperlukan dalam pengelolaan pendidikan inklusif²⁷. Tenaga profesional sengaja mereka dari lembaga yang terkait, karena madrasah tidak mempunyai tenaga profesional kecuali psikolog dan konselor itupun juga masih terbatas. Hal terpenting dari

²⁷ Hakiman, Bambang Sumardjoko, and Deddy Ramdhani, "Worship Learning for Students with Autism in Inclusive Primary," *Specialis Ugdyas* 1, no. 43 (2022): 6133–6153, <https://www.sumc.lt/index.php/se/article/view/775>.

penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah adanya asesmen, penyesuaian kurikulum dan pembelajaran.

3.3.1 Asesment

Madrasah dalam melakukan asesmen berpedoman pada dokumen asesment yang sudah terverifikasi, tetapi untuk keakuratan hasil asesmen pihak madrasah menerima hasil asesmen dari lembaga profesional yang dibawa oleh orangtua wali siswa anak berkebutuhan khusus. Madrasah dalam hal ini hanya menindaklanjuti dari hasil asesment yang telah dilakukan oleh orangtua bersama lembaga profesional.

Keberadaan asesmen menjadi penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, karena dari asesmen itulah yang akan menjadi pijakan guru kelas dan guru pendamping memberikan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus. Proses asesmen dilakukan oleh para ahli dalam bidangnya seperti psikolog, konselor, psikiater, dokter dan pedagog. Madrasah penyelenggara pendidikan inklusif perlu untuk menyediakan ahli dalam melakukan asesmen dan hasil rekomendasi dari hasil asesmen kemudian ditindaklanjuti oleh guru dalam memberikan pendidikan di madrasah.

Cara untuk menemukan anak berkebutuhan khusus, yaitu cara sederhana menggunakan check list berdasarkan ciri anak berkebutuhan khusus dan cara profesional menggunakan perangkat tes standar. Identifikasi terhadap anak berkebutuhan khusus diperlukan agar keberadaan mereka dapat diketahui sedini mungkin terkait dengan kelainan, penyimpangan, potensi, dan hambatan yang dimiliki. Identifikasi bertujuan untuk mendai gejala yang berhubungan dengan penyimpangan perilaku yang mengakibatkan adanya hambatan belajar di sekolah yang dapat dilakukan oleh guru dan orang tua.

Sasaran identifikasi adalah anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah reguler. Strategi pelaksanaan identifikasi antara lain menghimpun data anak, menganalisis data dan mengklasifikasi anak, menginformasikan hasil analisis dan klasifikasi, menyelenggarakan pembahasan kasus serta menyusun laporan hasil pembahasan kasus. Asesmen Anak berkebutuhan khusus yaitu proses pengumpulan informasi tentang anak secara keseluruhan dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik kelainan, kekuatan dan kelemahan sebagai dasar penyusunan program pembelajaran sehingga proses melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Tujuan melakukan asesmen kepada anak berkebutuhan khusus yaitu untuk mencari informasi lengkap tentang kondisi gangguan dan gejala-gejala yang menyertai hambatan yang dihadapi karena karakteristik psikologis, kemampuan, kebutuhan, kelebihan kekurangan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan anak-anak dengan kebutuhan khusus agar dipertimbangkan untuk merancang program pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik kemampuan dan kebutuhan sehingga anak-anak dapat mengembangkan kemampuan diri seoptimal mungkin sesuai dengan potensi mereka. Kegiatan asesmen sangat penting untuk mengetahui Informasi pemantauan standar pendidikan dengan cara yang paling tepat, Informasi sebagai

identifikasi awal pembelajaran khususnya bagi siswa berkebutuhan khusus dan pengembangan kebijakan dan prosedur untuk menilai pembelajaran secara berkelanjutan²⁸.

Strategi asesmen anak berkebutuhan khusus adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan informasi tentang kondisi, kekuatan, dan kelemahan serta kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang akurat dan lengkap sehingga informasi yang diperoleh dapat dijadikan kesimpulan yang tepat dan digunakan untuk langkah selanjutnya, yaitu penyusunan program proses pembelajaran. Beberapa prosedur atau strategi pelaksanaan asesmen yang dapat dipilih, antara lain observasi, analisis sampel kerja, analisis tugas, inventori informal, daftar cek, skala penilaian, dan wawancara. Asesmen yang digunakan lebih menekankan pada asesmen akademik. Adapun langkah tindakan lanjut asesmen yang dapat dilakukan yaitu perencanaan pembelajaran (membuat program pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan pemantauan kemajuan belajar dan evaluasi. Tujuan dari asesmen adalah kelayakan pemberian layanan khusus pada siswa, terutama pada kriteria klasifikasi yang telah ditentukan, pengembangan individualized education program (IEP) atau Program pembelajaran Individual (PPI), perencanaan untuk mendukung tingkah laku yang positif dan proses pengawasan²⁹.

Dari hasil observasi dan wawancara pada empat objek penelitian, madrasah tidak melakukan asesmen secara mandiri karena keterbatasan ahli pendukung di madrasah. guru menyarankan kepada orangtua untuk melakukan asesmen mandiri ke psikolog atau pusat penanganan disabilitas terdekat. Hasil dari asesmen yang di bawa orangtua kemudian diserahkan kepada madrasah sebagai pegangan guru dalam memberikan layanan. Kenapa madrasah menyarankan kepada orangtua untuk melakukan asesmen mandiri karena madrasah tidak mempunyai ahli dan alat standar asesmen.

Disisi lain guru juga melakukan tes asesmen sederhana dengan sarana yang ada di madrasah, masing-masing madrasah dilengkapi dengan ruang sumber sebagai tempat khusus untuk melakukan pendampingan atau memberikan pembelajaran khusus serta memberikan terapi ringan. Tes sederhana yang dilakukan adalah asesmen umum yaitu tes fisik seperti siswa memiliki anggota gerak lengkap, anggota gerak berfungsi secara baik dan siswa cenderung suka bergerak (hiperaktif). Tes kognitif seperti: siswa mampu membaca kalimat-kalimat sederhana, siswa mampu membilang dari angka 1-100, siswa cenderung mudah menghafal sesuatu. Adapun interaksi sosial seperti: siswa tidak tertarik untuk bermain bersama teman atau lebih suka menyendiri, tidak ada atau sedikit kontak mata, atau menghindar untuk bertatap dan siswa

²⁸ Beth Haller, Sue Ralph, and Zosia Zaks, *Confronting Obstacles to Inclusion: International Responses to Developing Inclusive*, ed. Richard Rose, 1st ed. (London, 2010), 328. <https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9780203846780/confronting-obstacles-inclusion-richard-rose>.

²⁹ Diane. M Browder, *Curriculum and Assessment for Students with Moderate and Server Disabilities*, 1st ed. (The Guilford Press, 2001), 402. <https://www.amazon.com/Curriculum-Assessment-Students-Moderate-Disabilities/dp/1572306157>.

senang menarik-narik tangan orang lain untuk melakukan apa yang ia inginkan, misalnya bila ingin digaruk tangannya. Tes komunikasi meliputi: siswa tidak merespon ketika dipanggil, siswa tidak memperhatikan ketika diajak bicara, senang meniru atau membeo (echolalia). Tes sensoris yaitu siswa apabila mendengar suara keras langsung menutup telinga dan emosi yaitu siswa tidak suka menyakiti diri sendiri dan orang lain ketika marah.

Hasil identifikasi dan asesment menjadi dasar untuk memberikan layanan pendidikan bagi siswa anak berkebutuhan khusus, madrasah memberikan kurikulum yang bersifat fleksibel. Madrasah melakukan modifikasi, adaptasi dan akomodasi pada kurikulum, modifikasi kurikulum dilakukan pada aspek tujuan, isi, proses dan evaluasi. Modifikasi isi materi yaitu merubah pembelajaran siswa regular disesuaikan dengan siswa berkebutuhan khusus³⁰. Hasil penelitian ini juga memperkuat pendapatnya Dora D Onwumere bahwa untuk mengajarkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan mereka diperlukan kurikulum independen³¹. Rencana program pembelajaran dibuat secara kolaboratif antara guru mata pelajaran, guru kelas dan guru pendamping khusus yang selanjutnya akan menjadi program pembelajaran individual yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Program pembelajaran individual atau IEP dibuat berdasarkan pada kebutuhan anak masing-masing³².

3.3.2. Kurikulum dan Pembelajaran

Kurikulum yang digunakan di madrasah adalah kurikulum 2013 yang diadaptasi dan dimodifikasi berdasarkan pada kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Kurikulum yang dikembangkan oleh penyelenggara pendidikan inklusif harus mengedepankan inklusifitasnya, kurikulum bagi penyelenggara pendidikan inklusif meliputi: 1). Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak, bukan sebaliknya. Sekolah harus memberikan kesempatan kurikuler dengan kemampuan dan minat anak-anak yang berbeda. 2). Anak-anak dengan kebutuhan khusus harus menerima dukungan pembelajaran tambahan dalam konteks dan kurikulum reguler, bukan kurikulum berbeda³³. Prinsip harus memberikan semua anak dengan pendidikan yang sama, serta memberikan bantuan tambahan dan dukungan untuk anak-anak yang membutuhkan tersebut.

Dari empat madrasah yang menjadi objek penelitian semuanya melakukan adaptasi dan modifikasi kurikulum yang menjadi pegangan madrasah. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan inklusif lebih condong pada model kurikulum adaptasi dan modifikasi. Ada 5 tahap

³⁰ Richardson-gibbs, Anne Marie, and Diane M Klein, *Making Preschool Inclusion Work: Strategies for Supporting Children, Teachers, and Programs*, 1st ed. (London: Paul. H. Brokes Publishing, 2012), 189. <https://www.amazon.com/Making-Preschool-Inclusion-Work-Strategies/dp/1598572113>.

³¹ Dora D. Onwumere et al., "The Impact of an Independence Curriculum on Self-Determination and Function in Middle School Autistic Students," *Journal of Occupational Therapy, Schools, and Early Intervention* 00, no. 00 (2020): 1–15, <https://doi.org/10.1080/19411243.2020.1799904>.

³² Zulyan et al., "Studi Tentang Individualized Education Program (IEP) Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Pembelajaran PPKN," *JOEAI, Journal of Education and Instruction* 3, no. 2 (2020): 385–393.

³³ The Salamanca Statement, "The Salamanca Statement And Framework For Action on Special Needs Education," 1994, last modified 1994, accessed June 16, 2022, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098427>.

yang dilakukan guru sebelum melakukan adaptasi kurikulum yaitu: 1). Melakukan analisa dari hasil asesmen akademik, kemungkinan kebutuhan adaptasi atau tidak, 2). Menentukan adaptasi kurikulum yang harus dipilih: modifikasi atau akomodasi, 3). Menentukan capaian standar yang perlu dimodifikasi, 4). Menentukan capaian kelas dimodifikasi dan 5). Menyesuaikan capaian kelas³⁴.

Pada proses pembelajaran siswa anak berkebutuhan khusus dilakukan oleh guru kelas dan guru pendamping khusus, tetapi karena keterbatasan guru pendamping khusus mereka langsung didampingi oleh guru mata pelajaran. Guru pendamping khusus mendampingi apabila sangat mendesak untuk didampingi. Guru memberikan pembelajaran dengan menggunakan program pembelajaran individual. Program pembelajaran individual dibuat oleh guru kelas dan guru pendamping khusus berdasarkan pada kebutuhan siswa anak berkebutuhan khusus. Praktik Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar siswa³⁵. Pembelajaran bersifat adaptif yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpartisipasi semaksimal mungkin dalam kegiatan kelas. Pembelajaran dilakukan melalui perencanaan yang meliputi: 1). Memahami karakteristik siswa (hasil identifikasi dan asesmen), 2). Mengembangkan perangkat pembelajaran silabus, program pembelajaran individual yang didasarkan pada hasil identifikasi semua siswa, 3). Menyusun dan memodifikasi perangkat pembelajaran yang dapat mengakomodasi perangkat pembelajaran yang dapat mengakomodasi semua siswa.

Guru di madrasah juga melakukan modifikasi metode dan evaluasi pembelajaran, metode dan media yang digunakan sangat variatif supaya tujuan pembelajaran tersampaikan. Untuk membantu tercapai pembelajaran media yang digunakan adalah audio visual. Audio visual cukup efektif dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus³⁶. Yang menjadi problem utama dalam pembelajaran adalah kurangnya guru pendamping khusus sehingga pembelajaran masih belum maksimal. Pembelajaran dibuat se fleksibel mungkin untuk anak berkebutuhan khusus. Praktik pembelajaran di madrasah inklusif dilakukan dengan kolaboratif, *Collaborated teaching* ada ketika guru bersama-sama dalam merencanakan, mengajar dan menilai prestasi siswa hal ini disimpulkan oleh Wendy Murawski dan Claire Hughes³⁷ dan Marjatta Takala and Lotta Uusitalo-Malmivaara³⁸.

³⁴ Lee Ann Jung and Thomas R Guskey, *Grading Exceptional and Struggling Learners*, 1st ed. (Corwin, 2011), 128. <https://www.amazon.com/Grading-Exceptional-Struggling-Learners-Jung/dp/1412988330>.

³⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif (Pensif) Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Atau Bakat Istimewa," 05 Oktober 2009, last modified 2009, <https://peraturanpedia.id/peraturan-menteri-pendidikan-dan-kebudayaan-nomor-70-tahun-2009/>.

³⁶ Oktaviana Saputri, Hakiman, and Suluri, "Instructional Methods Applied by Visually Impaired Teachers in Teaching Students with Intellectual Disability," *Tadris* 15, no. 1 (2020): 8–22.

³⁷ Wendy W. Murawski and Claire E. Hughes, "Response to Intervention, Collaboration, and Co-Teaching: A Logical Combination for Successful Systemic Change," *Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth* 53, no. 4 (2009): 267–277.

³⁸ Marjatta Takala and Lotta Uusitalo-Malmivaara, "A One-Year Study of the Development of Co-Teaching in Four Finnish Schools," *European Journal of Special Needs Education* 27, no. 3 (2012): 373–390.

Ketika guru berkolaborasi, mereka akan berbagi pengalaman, pengetahuan yang akan membantu mereka untuk memperkuat pembelajaran dan selanjutnya meningkatkan prestasi siswa.

Dalam pelaksanaan pembelajaran di madrasah inklusif bagi siswa anak berkebutuhan khusus dilakukan dengan cara berkolaborasi antara guru mata pelajaran dan guru pendamping khusus, Guru bekerja secara kolaboratif dalam memberikan pembelajaran di dalam kelas³⁹. Kolaborasi menjadi penting dalam memberikan penanganan pada siswa berkebutuhan khusus Kolaborasi perlu dilakukan juga dengan para profesional⁴⁰. Metode pembelajaran yang digunakan mendukung untuk anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan video pembelajaran berbassis visual. Guru pendamping khusus memberikan pengulangan secara individual pada anak berkebutuhan khusus serta guru juga memanfaatkan peran teman sebaya untuk membantu dalam memberikan pembelajaran, ruangan kelas disetting inklusif sehingga anak berkebutuhan khusus dapat berbaur dengan anak lainnya. Kelas inklusif menjadi alat dukung dalam memberikan dukungan bagi siswa anak berkebutuhan khusus⁴¹. Untuk melihat perkembangan anak berkebutuhan khusus, guru memberikan evaluasi yang dimodifikasi yaitu soalnya berberbbeda dengan anak yang bukan anak berkebutuhan khusus. Guru pendamping khusus memberikan evaluasi secara individual, soal yang digunakan biasanya berupa gambar-gambar yang menarik siswa anak berkebutuhan khusus dalam menjawab soal-soal.

Madrasah Inklusif sebagai tempat untuk memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali, dalam hal ini pendidikan inklusif bukan hanya sebagai alternatif untuk anak disabilitas⁴² tetapi madrasah inklusif mampu memberikan layanan yang terbaik bagi anak berkebutuhan khusus terlepas dari kekurangan yang ada, karena problem penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi problem yang dihadapi oleh seluruh negara, penyelenggaraan pendidikan inklusif di Asia masih menyisakan problem. Diantara probelem yang didapi dalam penyelenggaraan madrasah inklusif yaitu kurang ketersediaannya guru pendamping khusus, ahli teraspir dan profesional.

4. Kesimpulan

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah ibtidaiyah di jawa tengah dapat dilihat dari tiga pilar yaitu kebijakan, budaya dan praktik. Kebijakan madrasah inklusif secara top down yaitu dari pemerintah pusat dan kementerian agama, yang di implementasikan oleh madrasah inklusif dalam

³⁹ Suzanne Carrington et al., "What Universal Design for Learning Principles, Guidelines, and Checkpoints Are Evident in Educators' Descriptions of Their Practice When Supporting Students on the Autism Spectrum?," *International Journal of Educational Research* 102, no. December 2019 (2020): 101583, <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101583>.

⁴⁰ Steffie Van Der Steen et al., "Teaching Students with Autism Spectrum Disorders: What Are the Needs of Educational Professionals?," *Teaching and Teacher Education* 90 (2020), 1-19.

⁴¹ Jamie Gledhill and Janec Currie, "Socio-Political and Education Perspectives of Autism Spectrum Disorder (ASD): A Case for Inclusive Classroom Strategies Which Build Social Support?," *Journal of Educational and Human Development* 9, no. 1 (2020): 16–24.

⁴² Auhad Jauhari, "Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas," *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching* 1, no. 1 (2017).

berbagai inovasi kebijakan di madrasah. Kebijakan pendidikan inklusif di madrasah ibtidaiyah, diwujudkan dalam visi dan misi, progra unggulan dan tujuan madrasah. Adapun budaya inklusif di madrasah dibangun melalui kebijakan kepala sekolah dalam memberikan layanan pendidikan inklusif, merubah paradigma civitas madrasah dalam melihat keragaman siswa dan peningkatan sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan pelatihan dan workshop penanganan siswa berkebutuhan khusus. Pada tataran praktik penyelenggaraan pendidikan inklusif diwujudkan dengan adanya kerjasama dengan lembaga, puskesmas, rumahsakit dan pusat layanan disabilitas dan lembaga profesional disabilitas. Praktik penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah nampak dari adanya asesment pada peserta didik, adaptasi dan modifikasi kurikulum, rencana program individual, modifikasi pembelajaran dan lingkungan yang mendukung disabilitas. Penyelenggaraan pendidikan inklusif masih menyisakan problem diantaranya kurang tersedianya guru pendamping khusus, dukungan ahli dan profesional, sarana terafi serta minimnya anggaran dana. Perlu ada penelitian lebih lanjut berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya manusia serta pengembangan kurikulum, yang menjadi komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah.

ACKNOWLEDGEMENT

Kami penulis artikel ini mengucapkan terimakasih kepada civitas akademika Madrasah Ibtidaiyah Keji Ungaran Kabupaten Semarang, Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Kebarongan dan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Sidomulyo, Madrasah Ibtidaiyah Keji Ungaran Kabupaten Semarang yang telah mengujinkan kami untuk melakukan penelitian.

Referensi

- Arlinwibowo, Janu, Heri Retnawati, Badrun Kartowagiran, and Yunus Mustaqim. "Inclusion Schools in the Daerah Istimewa Yogyakarta Province, Indonesia: Regulations, Facilities and Aspirations of Teachers." *International Journal of Early Childhood Special Education* 13, no. 1 (2020): 09–19.
- Booth, Tony, and Mel Ainscow. *Index for Inclusion Developing Learning and Participation in School*. United Kingdom: Centre for Studies on Inclusive Education, 2002. [https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index English.pdf](https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20English.pdf).
- Browder, Diane. M. *Curriculum and Assesment for Students with Moderate and Server Disabilities*. 1st ed. The Guilford Press, 2001. <https://www.amazon.com/Curriculum-Assessment-Students-Moderate-Disabilities/dp/1572306157>.
- Carrington, Suzanne, Beth Saggars, Amanda Webster, Keely Harper-Hill, and Julie Nickerson. "What Universal Design for Learning Principles, Guidelines, and Checkpoints Are Evident in Educators' Descriptions of Their Practice When Supporting Students on the Autism Spectrum?" *International Journal of Educational Research* 102, no. December 2019 (2020): 101583. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101583>.
- DeMatthews, David, Bonnie Billingsley, James McLeskey, and Umesh Sharma. "Principal Leadership for Students with Disabilities in Effective Inclusive Schools." *Journal of Educational Administration* 58, no. 5 (2020): 539–554.
- Faragher, Rhonda, Mo Chen, Lucena Miranda, Kenneth Poon, Rumiati, Feng Ru Chang, and Holly Chen. "Inclusive Education in Asia: Insights From Some Country Case

- Studies." *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities* 18, no. 1 (2021): 23–35.
- Fernandes, Reno. "Adaptasi Terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusif." *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 4, no. 2 (2017): 119–125.
<http://socius.ppj.unp.ac.id/index.php/socius/article/view/16/10>.
- Francis, Grace Lavin, Carlos E Lavin, Jessica Sanchez, Alexandra S Reed, Linda Mason, College Education, and Human Development. "Inclusive Education De Fi Nitions and Practices : Exploring Perspectives of Education Professionals in Mexico City" (2020).
- Gledhill, Jamie, and Janec Currie. "Socio-Political and Education Persfpectives of Autism Spectrum Disorder (ASD): A Case for Inclusive Classroom Strategies Which Build Social Support?" *Journal of Educational and Human Development* 9, no. 1 (2020): 16–24.
- Hakiman, Bambang Sumardjoko, and Deddy Ramdhani. "Worship Learning for Students with Autism in Inclusive Primary." *Specialusis Ugdymas* 1, no. 43 (2022): 6133–6153.
<https://www.sumc.lt/index.php/se/article/view/775>.
- Hakiman, Bambang Sumardjoko, and Waston. "Religious Instruction for Students with Autism in an Inclusive Primary School." *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research* 20, no. 12 (2021): 139–158.
- Haller, Beth, Sue Ralph, and Zosia Zaks. *Confronting Obstacles to Inclusion: International Responses to Developing Inclusive*. Edited by Richard Rose. 1st ed. London, 2010.
<https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9780203846780/confronting-obstacles-inclusion-richard-rose>.
- Hanum, Lathifah. "Pembelajaran Pai Bagi Anak Berkebutuhan Khusus." *Pendidikan Agama Islam* 11, no. 1 (2012): 81–89.
- Jauhari, Auhad. "Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas." *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching* 1, no. 1 (2017).
- Jung, Lee Ann, and Thomas R Guskey. *Grading Exceptional and Struggling Learners*. 1st ed. Corwin, 2011. <https://www.amazon.com/Grading-Exceptional-Struggling-Learners-Jung/dp/1412988330>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif (Pensif) Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Atau Bakat Istimewa." *05 Oktober 2009*. Last modified 2009. <https://peraturanpedia.id/peraturan-menteri-pendidikan-dan-kebudayaan-nomor-70-tahun-2009/>.
- Köpfer, Andreas, and Edda Óskarsdóttir. "Analysing Support in Inclusive Education Systems—a Comparison of Inclusive School Development in Iceland and Canada since the 1980s Focusing on Policy and in-School Support." *International Journal of Inclusive Education* 23, no. 7–8 (2019): 876–890.
- Manar, Dzunuwanus Ghulam. "Pembelajaran Inovasi Kebijakan Inklusif." *Jurnal Studi Pemuda* 7, no. 1 (2019): 14.
- Marcoulides, George A, Ronald H. Heck, and Constantinos Papanastasiou. "Student Perceptions of School Culture and Achievement: Testing the Invariance of a Model." *International Journal of Educational Management* 19, no. 2 (2005): 141–153.
- Matolo, Manthema Florina, and Awelani M. Rambuda. "Factors Impacting the Application of an Inclusive Education Policy on Screening, Identification, Assessment, and Support of the Learners at Schools in South Africa." *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research* 20, no. 9 (2021): 207–221.
- Miles, Matthew B, Micheal Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 3rd ed. California: SAGE Publication, Inc, 2014.
<https://www.amazon.com/Qualitative-Data-Analysis-Methods-Sourcebook/dp/1452257876>.
- Mosia, Paseka Andrew. "Threats to Inclusive Education in Lesotho: An Overview of Policy and Implementation Challenges." *Africa Education Review* 11, no. 3 (2014): 292–310.
- Mukaffa, Zumrotul. "Pngembangan Model Madrasah Inklusif (Studi Atas Kesiapan Dan

- Model Pengembangan Kurikulum Madrasah Inklusif Madrasah Ibtidaiyah AL-Hidayah Margorejo Surabaya)." *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2017): 1.
- Mukhlis. "Kebijakan Pendidikan Inklusif: Implementasinya Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 1 (2011).
- Murawski, Wendy W., and Claire E. Hughes. "Response to Intervention, Collaboration, and Co-Teaching: A Logical Combination for Successful Systemic Change." *Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth* 53, no. 4 (2009): 267–277.
- Onwumere, Dora D., Yamaris M. Cruz, Lauren I. Harris, Katherine A. Malfucci, Steven Seidman, Cynthia Boone, and Kristie Patten. "The Impact of an Independence Curriculum on Self-Determination and Function in Middle School Autistic Students." *Journal of Occupational Therapy, Schools, and Early Intervention* 00, no. 00 (2020): 1–15. <https://doi.org/10.1080/19411243.2020.1799904>.
- Qomariyah, Lailil, Erwan Hermawan, Akmal, Kulsum, Maskanah, Retno Dewi Utami, Iin Aulia, and Nunu Nurdyana. *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Madrasah*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017.
- Rahmi, Aulia, and Muqowim. "Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Madrasah Di Sumatera Barat." *Ranah Research Journal of Multidisciplinary Research and Development* 4, no. 2 (2019): 15–25.
- Ramadanti, Fahriza Ragil, and Harto Wicaksono. "Model Pendidikan Inklusi Dan Respon Orang Tua Dalam Implementasi Sekolah Inklusif Di MI Keji Ungaran Barat, Semarang Fahriza Ragil Ramadanti, Harto Wicaksono" 10, no. 1 (2021): 23–37. <https://journal.unnes.ac.id/>.
- Rasmitadila. *Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Edited by Nur Indah Sari Yanita. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Richardson-gibbs, Anne Marie, and Diane M Klein. *Making Preschool Inclusion Work: Strategies for Supporting Children, Teachers, and Programs*. 1st ed. London: Paul. H. Brokes Publishing, 2012. <https://www.amazon.com/Making-Preschool-Inclusion-Work-Strategies/dp/1598572113>.
- Saputri, Oktaviana, Hakim, and Suluri. "Instructional Methods Applied by Visually Impaired Teachers in Teaching Students with Intellectual Disability." *Tadris* 15, no. 1 (2020): 8–22.
- Van Der Steen, Steffie, Carla H. Geveke, Anne T. Steenbakkens, and Henderien W. Steenbeek. "Teaching Students with Autism Spectrum Disorders: What Are the Needs of Educational Professionals?" *Teaching and Teacher Education* 90 (2020).
- Sumarni. "Pengelolaan Pendidikan Inklusif Di Madrasah." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 17, no. 2 (2019): 148–161. <https://jurnaledukasikemenag.org/index.php/edukasi>.
- Takala, Marjatta, and Lotta Uusitalo-Malmivaara. "A One-Year Study of the Development of Co-Teaching in Four Finnish Schools." *European Journal of Special Needs Education* 27, no. 3 (2012): 373–390.
- The Salamanca Statement. "The Salamanca Statement And Framework For Action on Special Needs Education." 1994. Last modified 1994. Accessed June 16, 2022. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098427>.
- Wahyudi, Wahyudi, and Ratna Kristiawati. "Gambaran Sekolah Inklusif Di Indonesia: Tinjauan Sekolah Menengah Pertama." *Gambaran Sekolah Inklusif Di Indonesia* (2016): xi–95. http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_14D0F106-F4EE-486B-A74F-84A191B4AD25_.pdf.
- Wibowo, Fakhruddin, Achmad Rifai, and Titi Prihatin. "Model Peningkatan Sumber Daya Pendidik Pada Madrasah Ibtidaiyah Inklusi Menghadapi Era Society 5.0 Dan Revolusi Industri 4.0." *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES* (2019): 910–916.
- Zamroni. *Kultur Sekolah*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2016.
- Zulaikhah, Dinda, Akhmad Sirojuddin, and Andika Aprilianto. "Analisis Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kurikulum K13 Bagi Anak Berkebutuhan." *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 1, no. 1 (2020): 54–71.

Zulyan, Joese Yolandari, Amanah Qurniati, and Muslih Hasibuan. "Studi Tentang Individualized Education Program (IEP) Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Pembelajaran PPKN." *JOEAI, Journal of Education and Instruction* 3, no. 2 (2020): 385–393.